

PERADABAN ISLAM DI INDIA-PAKISTAN

Mu'ammarr Zayn Qadafy

(Staf Pengajar STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi)

ABSTRACTS; *India - Pakistan became one of the great thinkers of Islam contributor. However , there is a big difference on the presence of Muslims in the two countries. This article was written to reveal the history of Islam and Islamic patterns in India and Pakistan as well as to the development of Islam in terms of aspects of science, socio-political and economic circumstances. It was concluded that the difference in the state of Muslims in the country are caused by two different state constitution . Muslims in India especially has experienced a series of setbacks of civilization, is inversely proportional to Pakistan which was established with the spirit of Islam and the Muslims prosper. However Pakistan which is predicted to be able to become an Islamic state monster, until now have not been able to counter India's economic and social terms.*

Keywords : *Islam, India - Pakistan, History of Civilization*

PENDAHULUAN

Dalam hubungan antara “Islam” sebagai agama dengan perilaku pemeluknya yang adalah manusia dengan kompleksitas dimensinya, Islam memiliki dua wajah sekaligus. Di satu sisi, Islam diformalisasikan ke dalam sistem-sistem yang dianggap mewakili keseluruhan perwujudan ajaran Islam. Sistem-sistem ini terlembagakan ke dalam apa yang kita kenal sebagai “organisasi masyarakat Islam”, “partai politik Islam” dan “negara Islam”. Di pihak lain, sebagian orang mempertanyakan kehadiran sistem “Islami tersebut” karena dianggap membuat mereka yang tidak beragama Islam sebagai warga dunia yang kalah dari kaum muslimin (Wahid, 2006: 4).

Secara teoretis, John O. Voll dalam tulisannya di *The Encyclopedia of Islam and Muslim World*, memberi penegasan tentang dua makna umum dari kata Islam. Signifikansi pertama merujuk pada Islam sebagai penyerahan diri dan ketaatan total terhadap Tuhan yang terimplementasikan dalam pelaksanaan ritual-ritual dan terintegrasikan dalam kesalehan sosial. dalam defnisi ini, Islam adalah bagian dari struktur dan kosa kata teologis. Identifikasi kedua merujuk kepada Islam sebagai kesatuan antara sistem kepercayaan, pemeluk-pemeluknya dan daerah-daerah di mana Islam dipraktikkan (O. Voll, tt: 359).

Adanya dua kelompok diatas paling tidak memberikan gambaran bahwa “Islam” bukanlah sebuah entitas yang bisa berdiri sendiri. Sejak ia diproklamirkan untuk menjadi bagian dari peradaban manusia, saat itu pula muncul ke-saling

terikatan antara keduanya. Dengan demikian, dalam pengertian paling sederhana, jaya-tidaknya Islam juga bisa dilihat dari maju-tidaknya negara-negara yang “diakui” sebagai negara Islam.

Al Ghazali (1999: 165-166) berpendapat bahwa di luar klaim ideologis bahwa hakikat Islam yang terepresentasikan oleh al-Qur'an sebagai nafas dan sendi peradaban belum sekalipun terbukti pernah tunduk sepenuhnya pada hukum jatuh-bangunnya sebuah peradaban, sehingga jalan kebangkitan selalu terbuka bagi umat Islam asal mau meraih kembali masa kejayaannya, kajian mengenai pasang surut peradaban Islam urgen untuk dilakukan. Utamanya untuk dua tujuan sekaligus: mempelajari sebab-sebab kemajuan peradaban dan berjaga-jaga dari kemundurannya.

Artikel ini akan membahas Peradaban Islam India-Pakistan dan pasang surutnya. Tema ini menjadi menarik karena kedua negara memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kedua negara ini juga secara permanen menjadi contoh dari dua institusi yang berbeda: negara Muslim dan negara Islam. Pada abad ke-20, orang mulai membedakan antara atribut “Islami” dan “Muslim”. Istilah Muslim merepresentasikan sebuah komunitas dengan serangkaian praktik-praktiknya yang khas, sedangkan istilah “Islami” diatributkan pada instansi-instansi tertentu yang secara sadar berusaha merefleksikan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan fundamental dari Islam dengan cara-cara tertentu yang terbatas. Pada pemakaiannya, “negara Muslim” adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan negara Islam adalah negara yang memiliki program implementasi aturan-aturan Islam secara formal (Voll, tt: 359). Pada konteks ini, India mewakili negara muslim dengan populasi muslim terbesar ketiga di dunia. Sedangkan Pakistan, adalah satu-satunya negara Muslim yang didirikan atas nama Islam.

PEMBAHASAN

A. Masuknya Islam dan Corak Keislaman di India-Pakistan

Kemal Faruqi dalam Esposito (1987: 53), mengatakan bahwa awal kekuasaan Islam di wilayah Asia Selatan terjadi pada masa khalifah al-Walid dari dinasti Umayyah (sekitar 1000 M). Sejak itu, beberapa dinasti silih berganti memimpin India dan kerajaan-kerajaan Islam di Afganistan, Baluchistan dan lain-lain. Pada

masa pemerintahan Dinasti Ghaznawi, Penduduk asli India mendeklarasikan perang terhadap negara-negara Islam meskipun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Mahmud, putera mahkota kerajaan Sebuktigin.

Pada 1008 M, Mahmud juga berhasil menaklukkan koalisi negara-negara India (Ujjayn, Gwalior, Kalinjar, Kannawj, Delhi dan Ajmer). Melalui sejarah yang panjang, sebagian besar daerah di India berhasil dikuasai Islam, apalagi pasca kemunculan dinasti Mughal (1516), sebelum akhirnya pada 1700-an dinasti ini melemah dan akhirnya runtuh. Kerajaan Mughal di India dengan Ibukota Delhi didirikan oleh Dahir al-Din Babur (1482-1530). Raja-raja Mughal yang terkenal setelah Babur adalah Akbar, Jehangir (1605-1628), Syeh Jehan (1628-1658) dan Aurangzeb (1658-1707) (Lihat: Badri Yatim, 1998, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 148-150).

Awal abad ke-19, Era India modern dimulai dengan masuknya Inggris melalui *East-India Company* (berdiri 1803). Hingga timbul kekacauan akibat hegemoni pedagang-pedagang Barat yang menguras kekayaan India dan berangsur-angsur menjadikan India negara amat miskin serta merusak budaya, tatanan sosial dan agamanya. Sejak itu, dimulailah era kapitalisme Industri Inggris yang menjadikan India hanya menjadi pasar bagi Inggris. Pada masa kolonial ini, banyak keluarga muslim yang kehilangan keamanan dan kebebasan mereka.

Pada 1857, Inggris mulai menghasut kelompok elit *ashraf* untuk meredakan gejolak kaum muslimin. Istilah *Ashraf* dan *ajlaf* muncul pada masa pemerintahan Mughal untuk membedakan antara kaum bangsawan dan proletar (Nasution (ed.), 1985: 141). Dukungan diberikan kepada Sir Sayyid Ahmad Khan yang menampakkan diri sebagai Islam liberal, dalam artian mengembangkan humanitarianisme, keserasian dengan sains Barat, menekankan kesamaan antar agama-agama dan memisahkan Islam dari kemunduran masyarakat Islam (Ali, 1993: 14-15). Mumtaz Ahmad (1993), mengatakan bahwa pada kurun 1860-1870-an, Sayyid Ahmad Khan lantas mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Aligarh yang pada awalnya diperuntukkan untuk golongan elit saja (Taylor, 1986: 143).

Adapun keberadaan Islam di Pakitan tidak bisa dipisahkan dari Islam di India. Pada 1906, beberapa sarjana Muslim India yang pernah belajar di Barat telah mendirikan sebuah organisasi politik yang disebut Liga Muslim India (India Muslim League) di Dhaka untuk memperjuangkan kepentingan komunitas Muslim

India di bidang keagamaan, budaya, politik dan ekonomi. Pada saat yang sama, tokoh Hindu ekstrem memulai gerakan *Shuddi* dan *Sangathan* untuk meng-hindukan umat Islam secara paksa. Ketika Liga Muslim dipimpin Mohammad Ali Jinnah, organisasi ini mengusulkan dibentuknya sebuah negara Muslim yang terpisah dari India di daerah Barat laut dan Timur laut India yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara inilah yang pada akhirnya disebut Pakistan (Ahmad, 1993: 287).

Setelah kekuasaan Inggris di India (sering disebut *British India*) resmi berakhir pada 14 Agustus 1947, resmi berdiri negara Pakistan. Maka tidak heran, Islam di India-Pakistan biasanya dibahas secara bersamaan. Sejak organisasi-organisasi pan-Islamisme berusaha memperkuat solidaritas Muslim di seluruh dunia, Pakistan pernah mencoba untuk membongkar penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dialami umat Islam di India. Populasi Muslim di India sejak 1947, pasca perginya Inggris berkisar 12% dari penduduk India secara keseluruhan. Meski demikian, jumlah Muslim di India masih menjadi populasi Islam terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan (Esposito, 1987: 152-153).

Barbara D. Mercalf menyatakan bahwa muslim di India tersebar di beberapa kota Bengal, Deccan, Gujarat, Hindustan, Mappila, Oriyya dan Punjab. Sebagian besar bermadzhab *sunni* mengikuti Hanafi dan Shafi'i. Hanya sekitar 10% menganut *shi'ah* *ithna 'ashariyyah* dan *Isma'iliyyah* (Esposito, 1987: 152-153). Sementara itu, Pakistan sebagai satu-satunya negara Muslim yang didirikan atas nama Islam, adalah negara Muslim terbesar kedua dengan 122,8 juta jiwa yang 97%nya Muslim.

Pakistan ka matlab kya? La ilaha illa Allah (What does Pakistan stand for? There is no god but God). Slogan ini populer didengungkan oleh liga Muslim ketika pembentukan negara Pakistan. Selain itu, pembukaan dalam kitab undang-undang mereka menyebutkan bahwa Pakistan adalah negara demokratis yang berdasarkan ajaran Islam. (Lihat: Mumtaz Ahmad, "Pakistan" dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1999, vol. 3, hlm. 287, 290). Sebagaimana dijumpai di India, di wilayah Pakistan madzhab *Sunni*-Hanafi mendominasi dan hanya sebagian kecil saja mengikuti Hanbali (Ahmad, 1993: 286).

B. Perkembangan Keilmuan Islam di India-Pakistan

Perkembangan keilmuan Islam di India-Pakistan yang pesat pertumbuhannya dapat terlihat dari beberapa aspek: *pertama*, kemunculan tokoh-tokoh muslim pemikir sekaligus pemimpin penting di India-Pakistan yang pemikirannya banyak menginspirasi sarjana-sarjana muslim lain, bahkan di luar India dan Asia. Mulai abad ke-19, muncul Shah Waliyullah al-Dihlawi (1703-1762), Ia adalah seorang pemimpin tarikat Naqshabandi yang juga pemikir keagamaan dan kenegaraan. Melihat melemahnya konfigurasi regional baru di India, ia mencetuskan ide tentang pengangkatan pangeran Mughal, seperti Afghan Shah Abdali sebagai pemimpin India (Mercalf, 1993: 189).

Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), Muhammad Iqbal (1877-1938), Mawlana Muhammad Ilyas (1885-1944), Mawlana Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979), dan Mawlana Abu al-Hasan 'Ali Nadwi (lahir 1914), juga Fazlur Rahman (wafat 1988), pengagum Iqbal sekaligus seorang pemikir yang tegas dan provokatif dengan idenya mengenai reformulasi doktrin dan praktik sosial dalam Islam. Dalam teorinya Fazlur Rahman menekankan bahwa penafsir al-Qur'an tradisional telah gagal dalam melihat prinsip universal dari al-Qur'an sebagai sebuah kesatuan.

Kedua, tumbuh suburnya madrasah-madrasah dan masjid-masjid yang dijadikan pusat kegiatan intelektual dan keagamaan. Di Pakistan, terdapat sekitar 200.000 masjid yang menjadi pusat 350.000 fungsionaris religius seperti *imam*, *khatib* dan *khadim*. Tidak seperti kebanyakan negara Muslim di Timur-Tengah, jaringan masjid dan madrasah di Pakistan bergerak di luar kendali pemerintah dengan otonomi penuh. Dan biasanya, dalam desa kecil yang tidak memiliki gedung publik, masjid biasa dijadikan forum untuk mendiskusikan isu-isu publik (Ahmad, 1999: 296).

Adapun madrasah, telah sejak dulu menjadi pusat studi Islam klasik sekaligus menjaga tradisi ortodoks di Asia Selatan. Di Pakistan, terdapat tidak kurang dari 2.000 madrasah yang menampung 316.000 murid. Jumlah yang besar ini adalah warisan dari kebangkitan pendidikan Islam di India sejak akhir abad ke-19. Tujuan utama didirikannya madrasah adalah: (1) memelihara tradisi Islam ortodoks, (2) melatih sarjana dan fungsionaris Islam, (3) menyiapkan pemimpin politik yang ulet, (4) membangunkan kembali kesadaran akan solidaritas Islam di Asia Selatan.

Sedangkan di India, seharusnya kota Delhi memiliki banyak masjid dan madrasah sekaligus bangunan-bangunan berarsitektur khas Islam karena selama ratusan tahun, dinasti-dinasti Islam silih berganti menjadikan Delhi pusat pemerintahannya. Namun, peninggalan-peninggalan yang ada sekarang hanyalah yang ditinggalkan oleh dinasti terakhir, Mughal, karena warisan-warisan yang sebelumnya telah diratakan dengan tanah oleh Timur Lenk (Yatim, 1989: 289-291).

C. Islam dan Politik di India-Pakistan

Perbedaan prinsipil antara Islam di India dan Pakistan adalah bahwa jumlah penganut Islam di India menjadi minoritas, berbanding terbalik dengan kondisi di Pakistan yang menjadi mayoritas. Keadaan ini tidak memberikan banyak pilihan dan kesempatan bagi umat Islam di India untuk ikut andil dalam politik negara, meskipun secara *de jure*, pada 1957, konstitusi India memberikan untuk pertama kalinya kepada umat Islam di Asia Selatan kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Konstitusi India dewasa ini mengadopsi model sekuler dengan pandangan modern dan liberal. Kesempatan yang diberikan oleh konstitusi India dimanfaatkan oleh umat Islam di sana untuk memperoleh jabatan publik. Mereka mengikuti pemilihan dan mendapatkan kursi di parlemen (*national and state legislatures*). Beberapa bahkan masuk dalam kabinet, menjadi gubernur dan hakim pada mahkamah agung meskipun persentasenya masih lebih kecil di bandingkan populasinya (Shahabuddin, 1987: 158-159).

Meski umat Islam di sana menjadi minoritas, namun umat Hindu yang jumlahnya hampir 81% pun terbagi menjadi banyak golongan-golongan kecil berdasarkan suku, agama dan sekte yang masing-masing. Hasilnya, undang-undang India menjadi protektif terhadap kepentingan minoritas. Shahabuddin (1987: 153-155) mencontohkan Pasal ke-14 misalnya, menjamin kesetaraan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Sementara dalam pasal 26, 27 dan 28, kaum minoritas dijamin kebebasannya untuk menata kehidupan keagamaannya. Pemerintah tidak diperkenankan mengambil retribusi terhadap kegiatan-kegiatan promosi masing-masing agama serta tidak mewajibkan seremoni peribadatan tertentu dalam sekolah-sekolah negeri. walaupun demikian terdapat beberapa pasal yang sarat kepentingan umat Hindu sebagai mayoritas. Di antaranya adalah pasal anti

penyembelihan sapi yang sering dianggap sebagai usaha pemerintah memaksakan etika kultural Hindu terhadap Muslim.

Faruqi (1987: 55-56) mengatakan bahwa di Pakistan, keadaan ini berbalik 180 derajat. Prinsip-prinsip Islam bahkan menjadi dasar dalam penetapan undang-undangnya. Pada kurun 1947-1971, tiga kali Pakistan mengalami perombakan konstitusi, namun ketiganya tetap mengakomodir prinsip-prinsip: (1) ke-maha kuasa-an Allah, (2) demokrasi, kebebasan, kesetaraan, toleransi dan keadilan sosial, (3) akhlak islami, (4) penyediaan fasilitas-fasilitas keagamaan, (5) pengajaran ajaran-ajaran Islam, (6) ketaatan pada standard moral Islam, (7) pengelolaan zakat dan wakaf, (8) larangan prostitusi, perjudian dan *drug*, (9) larangan minuman beralkohol, (10) penghapusan *riba*, (11) larangan atas segala bentuk penghinaan terhadap Islam.

Namun, ketegangan muncul di Pakistan. Pakistan memiliki dua wilayah yang secara geografis dan budaya berbeda: Pakistan Barat dan Timur. Kedua wilayah ini terpisah ribuan mil. Secara umum, terlihat bahwa peran politik Pakistan Barat lebih dominan, dan karenanya dianggap terlalu mengeksploitasi Timur. Tahun 1950-an, ketegangan memuncak di antara dua wilayah ini sebab faktor politis dan sosial. Ketegangan ini memuncak setelah pembunuhan perdana menteri pertama Pakistan Liaquat Ali Khantahun 1951, kekuasaan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan, dan kadang-kadang militer. Pakistan Timur menyadari jika salah satu dari mereka, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, atau Huseyn Shaheed Suhrawardy, terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh Pakistan Barat.

Kediktatoran militer Ayub Khan (27 Oktober 1958 - 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 - 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, hanya meningkatkan sikap bermusuhan Pakistan Timur. Di sisi sosialnya, penggunaan bahasa "Urdu" sebagai bahasa nasional juga direspon negatif oleh Pakistan Timur karena bahasa urdu memang digunakan oleh Pakistan barat, sementara Pakistan timur menggunakan bahasa Bengali (Lihat: David Taylor, 1985, "*Politik Islam dan Islamisasi di Pakistan*", dalam Harun Nasution (ed.), *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm. 153-154). Hingga pada 26 Maret 1971 Pakistan Timur resmi berpisah dari Pakistan dan menjadi negara Bangladesh dengan 90% penduduknya Muslim.

Beberapa pemerhati, seperti Mumtaz Ahmad (1988: 235), menganggap pecahnya Pakistan ini sebagai ketidak-mampuan Islam sebagai sebuah sistem pada masa itu untuk menjadi solusi alternatif bagi persatuan Pakistan. Kegagalan golongan elit di bidang pemerintahan, pendidikan, politik dan sosial untuk menghubungkan Islam dengan isu-isu yang aktual seperti persamaan distribusi ekonomi dan memberi suara pada sektor-sektor yang secara politis berhubungan, menjadikan kaum minoritas menganggap Islam tak lebih dari sekedar sarana eksploitasi saja.

D. Perekonomian India-Pakistan Dalam Kancah Internasional

Memang, negara bekas jajahan Inggris terbukti bisa *survive* dan berkembang menjadi negara besar. Ini dikarenakan, saat penjajahan, Inggris juga memperhatikan pendidikan dari negara jajahannya. Itu pulalah yang terjadi di India. Saat ini, India menjadi salah satu negara dengan perkembangan industri terpesat. Sebagai gambaran tahun 2012 yang lalu, kemajuan ekonomi di India digadang-gadang akan mampu menyaingi China karena beberapa alasan, yaitu; (1) konsumsi domestik yang rendah, (2) upah pekerja yang murah, (3) tingginya populasi penduduk usia muda (produktif), (4) kemampuan bahasa Inggris yang baik (Lihat: www.liputan6/bisnis.com. Diakses tanggal 28 Maret 2013). Sayangnya, komunitas Muslim di sana tidak menikmati kemajuan ini karena:

1. Perginya beberapa tokoh terpelajarnya Muslim ke Pakistan. Salah satunya adalah peristiwa eksodus besar-besaran terjadi tahun 1947. Orang-orang Islam dari perkotaan di Utara India yang kebanyakan adalah profesional dan kaum terpelajar pindah ke Pakistan. Sebaliknya, penganut Sikh dan Hindu yang masih ada di Pakistan pindah ke India. Migrasi yang sporadis ini terus berlangsung hingga 1971 (Shahabuddin, 1987: 157),
2. Meningkatnya gerakan anti-Muslim sejak 1990-an oleh kaum mayoritas (pemeluk agama Hindu). Hanya ada beberapa nama, seperti Zakir Husain dan Fakhruddin Ali Ahmad yang tercatat pernah sukses berkarir sebagai birokrat di India (Mercalf, 1993: 188).

Dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan, jalur yang harus ditempuh umat Islam lebih *ribet* dari pada umat Hindu. Meskipun untuk pekerjaan-pekerjaan level tinggi, sebab utamanya disinyalir adalah kurangnya kemampuan umat Islam

dalam hal tersebut. Pada pabrik-pabrik di sektor privat, perbedaan ini jelas terlihat. Dibandingkan non-Muslim, Jumlah pekerja Muslim total sebesar 7,23%, supervisor 2,23% dan eksekutif 1,5% (Shahabudin, 1987: 163-164).

Adapun Pakistan, hingga saat ini belum mampu sepenuhnya membuktikan dirinya sebagai negara Muslim yang stabil secara ekonomi. Baru-baru ini, IMF mendesak Pakistan untuk mengurangi defisit anggaran yang besar guna mendukung ketahanan ekonominya yang sedang sulit. IMF menyatakan pertumbuhan Pakistan masih terlalu lemah, inflasi tinggi, dan neraca perdagangan menuju ke arah yang salah (Tania Tobing, "Pertumbuhan Ekonomi Pakistan Masih Lemah", dalam www.vibiznews.com. Diakses tanggal 28 Maret 2013).

KESIMPULAN

Peradaban Islam di India-Pakistan memiliki ciri khas tersendiri di bandingkan dengan di negara-negara lain. Terutama jika dikaitkan dengan isu-isu sejarah, kebudayaan, politik dan ekonomi. Pembahasan mengenai Pakistan memang tidak bisa dilepaskan dari India karena secara historis, keduanya memiliki hubungan yang panjang, baik sebagai daerah geografis maupun sebagai pusat peradaban manusianya.

Dalam bidang kehidupan beragama, ada perbedaan frontal antara keadaan umat Islam di Pakistan dengan di India. Selain karena memang secara konstitusional kedua negara tersebut berbeda, umat Islam di India terutama telah mengalami rentetan kemunduran peradaban, berbanding terbalik dengan Pakistan yang didirikan dengan semangat memakmurkan Islam dan kaum muslimin. Hanya saja, kondisi ini tidak terjadi di bidang kehidupan ekonomi-sosial. Pertumbuhan ekonomi India kontemporer jauh meninggalkan Pakistan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mumtaz. "Pakistan" dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1993
- _____. "Pakistan", dalam Shireen T. Hunter (ed.), *The Politics of Islamic Revivalism*. Washington: Center for Strategies and International Studies, 1988
- Al-Ghazali, Muhammad. *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Qur'ân ?*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1999, cet. 2.
- Ali, Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di India-Pakistan*. Mizan: Bandung, 1993.

- El-Faruqi, Isma'il R. dan Lois Lamy' el-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing Company, 1986.
- Faruqi, Kemal A. "Pakistan: Islamic Government and Society", dalam John L. Esposito (ed.), *Islam in Asia: Religion, Politic and Society*. New York: Oxford Univerity Press, 1987.
- Hashmi, Suhail H. "Pan-Islam" dalam Richard C. Martin, *Encyclopedia of Islam and The Muslim World*. New York: MacMillan, 2004.
- Mercalf, Barbara D. "India" dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*. London: University of Chicago Press, 1984.
- Saraswati (2006), "Cultural Pluralism, National Identity and Development". *Interface of Cultural Identity Development* (edisi ke-1stEdition). New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts
- Shahabuddin. Syed dan Theodore P. Wright, Jr. "India (Muslim Minority Politic and Society)", dalam John L. Esposito (ed.), *Islam in Asia: Religion, Politic and Society*. New York: Oxford Univerity Press, 1987.
- Taylor, David. "Politik Islam dan Islamisasi di Pakistan", dalam Harun Nasution (ed.), *Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Tobing, Tania. "Pertumbuhan Ekonomi Pakistan Masih Lemah", dalam www.vibiznews.com.
- Voll, John O. "Islam and Islamic" dalam *The Encyclopedia of Islam and Muslim World*, ed. Richard C. Martin. New York: Macmillan Reference USA, tt.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam ANda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- www.liputan6/bisnis.com
- www.vibiznews.com.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998